

KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Oleh :
Brian Sagay

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: brnsagay@gmail.com

ABSTRAK

Berlakunya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah memberikan kewenangan bagi daerah dalam mengelolah keuangannya yang dituangkan dalam APBD. Pengelolaan APBD yang baik harus berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam mengelolah anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2009-2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan kinerja pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam mengelolah pendapatannya belum baik ini dilihat dari varians pendapatan yang menunjukkan belum adanya realisasi pendapatan yang mencapai target. Kinerja pemerintah dalam mengelolah anggaran belanja sudah cukup baik ini dilihat dari tidak adanya realisasi belanja yang melebihi dari yang diaanggarkan.

Kata kunci: *anggaran, pendapatan, belanja, kinerja keuangan daerah*

ABSTRACT

Enactment of Law No. 32 Year 2004 about region government give authority for each region to manage the finances as outlined in the APBD. Good APBD management should be economically viable, effective, and efficient to increase the prosperity of society The purpose of this study it was to examine and analyze the performance of the South Minahasa regency government in the manage revenue and expenditure budget for fiscal year 2009-2011. The method used in this study is descriptive method is to collect data to answer questions about the current status of research subjects. The results this study show the performance South Minahasa regency government poor to manage revenue have not seen this kind of income variance showed that the absence of revenue targets. Government performance to manage the budget is good enough which views of none actual expenditures in excess of the budgeted.

Keywords: *budget, revenue, expenditure, region financial performance*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, untuk itu dibutuhkan perubahan yang cukup mendasar dalam pengelolaan daerah, terutama pada manajemen dan pengelolaan keuangan daerah. Pentingnya pengelolaan keuangan daerah dipandang sebagai bagian yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemampuan keuangan daerah dalam mengelolah keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan daerah.

Pengelolaan APBD yang baik harus memperhatikan kepentingan publik maka realisasi dan pengalokasian dana terhadap program-program maupun berbagai kegiatan yang dibiayai akan memberikan manfaat yang besar sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan publik akan pelayanan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan publik. Akan tetapi dalam perkembangannya masih terdapat permasalahan dalam sistem pengelolaan terhadap APBD. Dalam realisasinya, APBD masih dikritik oleh masyarakat karena banyak terjadi pemborosan dana (*mark up*), kebocoran dana publik/korupsi, dan program-program maupun kegiatan yang tidak layak secara ekonomis. Untuk itu laporan APBD perlu dievaluasi optimalisasinya terhadap alokasi anggaran apakah telah berjalan secara ekonomis, efektif dan efisien (*value for money*) demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah, kinerja pemerintah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintahan dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi pemerintah. Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan, yang akan berdampak pada kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam anggaran berbasis kinerja secara struktur meliputi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Penekanan pada belanja daerah menjadi titik perhatian karena pada sisi belanja harus membutuhkan kinerja yang lebih baik, transparan dan tepat sasaran.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan Keuangan Daerah

Halim (2007:330) menyatakan bahwa, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam ketentuan umum pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menyatakan bahwa, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah.

APBD

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Mahsun (2006:146) menyatakan bahwa, APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya selama satu tahun anggaran. Darise (2008:133) menyatakan bahwa, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

1. Pendapatan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006, Mendefinisikan pendapatan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

2. Belanja Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Pembiayaan Daerah

Menurut undang-undang No. 32 tahun 2004, pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan menyangkut SILPA tahun anggaran sebelum, pencairan dana cadangan, hasil pengelolaan/penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman.

Kinerja

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi (Mahsun *dkk* 2011:141). Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika mampu melaksanakan tujuan yang telah disepakati bersama. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak dapat diketahui karna tidak ada tolak ukurnya. Sedangkan pengukuran kinerja adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Mardiasmo (2009:121) menyatakan bahwa, pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

Analisis Kinerja Pendapatan

Analisis terhadap kinerja pendapatan dapat dilihat secara umum dari realisasi pendapatan dan anggarannya. Apabila realisasi melampaui anggaran maka kinerjanya dapat dinilai dengan baik. Mahmudi (2010:135) menyatakan bahwa, analisis terhadap kinerja pendapatan antara lain dapat dilakukan dengan cara :

1. Analisis varians anggaran pendapatan

Analisis varians pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan. Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran).

2. Analisis rasio keuangan : rasio derajat desentralisasi

Rasio ini menunjukkan menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

3. Rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan.

4. Analisis pertumbuhan pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif.

Analisis Kinerja Belanja

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif. Dalam hal belanja daerah juga dianalisis keserasian belanja untuk menilai keserasian antara belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Mahmudi (2010:155) menyatakan bahwa, analisis anggaran belanja dilakukan dengan cara :

1. Analisis varians anggaran belanja

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominal atau persentasenya. Kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan, maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang kurang baik.

2. Analisis keserasian belanja : rasio belanja operasi dan modal terhadap total belanja

Analisis rasio ini untuk mengetahui keseimbangan antarbelanja. Menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal.

3. Rasio efisiensi belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Agus (2008)	Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kota Bitung.	Untuk mengetahui dan menganalisis realisasi pendapatan dan belanja daerah di kota Bitung.	Deskriptif	Anggaran pendapatan belanja daerah kota Bitung dari segi belanja baik karena realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan.	Peneliti sebelumnya melakukan penelitian terhadap faktor yang sama yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah.	Penulis menggunakan beberapa rasio dalam menganalisis APBD sedangkan peneliti sebelumnya hanya memakai selisih dan mengukur APBD dari segi belanja.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Data merupakan sekumpulan informasi mengenai objek yang akan diteliti dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Pada umumnya dalam penelitian ada dua jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Pitalong (2012:70) menyatakan bahwa, data kualitatif yaitu nilai dari perubahan-perubahan yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka sedangkan data kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data yang dapat dihitung untuk penafsiran kuantitatif yang kuat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kedua jenis data tersebut, yaitu data kualitatif dalam hal ini berupa gambaran umum kabupaten Minahasa Selatan dan data kuantitatif berupa Laporan Realisasi APBD pemerintah kabupaten Minahasa Selatan periode tahun 2007-2011.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya tanpa diolah terlebih dahulu. Data primer dalam penelitian ini berupa gambaran umum kabupaten Minahasa Selatan yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan karyawan yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh tetapi sudah diolah terlebih dahulu untuk memudahkan memahami data tersebut. data sekunder dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2009-2011.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2004-2012. Dengan terbatasnya data yang diperoleh dan berpatokan pada tahun terakhir anggaran, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini hanya terbatas pada Laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten Minahasa Selatan tahun 2007-2011.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Studi Lapangan dilakukan dengan melakukan observasi langsung ke tempat penelitian untuk memperoleh data dan mengetahui lebih jelas mengenai masalah yang diteliti.
2. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data tentang objek yang akan diteliti berupa Laporan Realisasi APBD

Metode Analisis

Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah dengan metode analisis deskriptif. Pitalong (2012:75) menyatakan bahwa, analisis deskriptif adalah merupakan analisis yang banyak digunakan untuk mengkaji satu variabel atau variabel mandiri. Analisis dalam penelitian ini adalah analisis kinerja pendapatan dan analisis kinerja belanja.

1. Analisis Kinerja Pendapatan (Mahmudi, 2010:135)
 - a. Analisis Varians Anggaran Pendapatan
 - b. Analisis Rasio Derajat Desentralisasi
 - c. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
 - d. Analisis Pertumbuhan Pendapatan
2. Analisis Kinerja Belanja (Mahmudi, 2010:155)
 - a. Analisis Varians Anggaran Belanja
 - b. Analisis Keserasian Belanja
 - c. Analisis Efisiensi Belanja

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2007-2011

Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan transfer pemerintah pusat dan provinsi dan juga berasal dari pendapatan lain-lain yang sah. Realisasi pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan untuk tahun anggaran 2007 mencapai Rp.410.775.272.732, tahun 2008 mencapai Rp.355.172.951.955, tahun 2009 mencapai Rp.425.904.804.490, tahun 2010 mencapai Rp.415.426.217.730, dan pada tahun 2011 mencapai Rp.515.891.352.257. Kabupaten memiliki pertumbuhan pendapatan dengan rata-rata dengan presentase 7,02% per tahun.

Pos-pos belanja Kabupaten Minahasa Selatan terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Realisasi belanja Kabupaten Minahasa Selatan untuk tahun 2007 senilai Rp.413.751.995.991, tahun 2008 senilai Rp.359.006.195.559, tahun 2009 senilai Rp.385.500.408.342, tahun 2010 senilai Rp.378.957.156.444, dan untuk tahun 2011 senilai Rp.483.807.278.567.

Pembahasan

Analisis Kinerja Pendapatan

1. Analisis Varians Anggaran Pendapatan

Tabel 2. Analisis Anggaran Pendapatan

Tahun	Anggaran	Realisasi	Varians	(%)
2007	408.146.681.849	410.775.272.732	-2.628.590.883	100,64
2008	369.891.401.238	355.172.951.955	14.718.449.283	96,02
2009	434.134.596.344	425.904.804.490	8.229.791.854	98,1
2010	424.042.313.500	415.426.217.730	8.616.095.770	97,97
2011	519.322.927.489	515.891.352.257	3.431.575.200	99,34
Rata-rata				98,41

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DPKPA Minahasa Selatan (Data Olahan)

Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan (Mahmudi, 2010:157). Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat kinerja pemerintah daerah kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2007 sangat baik dimana pemerintah daerah mampu merealisasikan pendapatannya melebihi dari yang dianggarkan. Namun pada tahun-tahun berikutnya pemerintah daerah mengalami penurunan kinerja ini dilihat dari tidak adanya realisasi pendapatan yang mampu melampaui dari yang telah dianggarkan. Melihat hal ini pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan harus lebih meningkatkan kinerjanya dalam merealisasikan anggaran pendapatan seperti pada tahun 2007.

2. Analisis Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel 3 Derajat Desentralisasi

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	(%)
2007	5.567.377.399	410.775.272.732	1,3
2008	4.209.053.938	355.172.951.955	1,2
2009	6.598.234.717	425.904.804.490	1,5
2010	5.594.269.278	415.426.217.730	1,4
2011	9.407.280.004	515.891.352.257	1,8
Rata-rata			1,4

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DPKPA Minahasa Selatan (Data Olahan)

Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah masih sangat kecil. Dengan hal ini dapat dilihat bahwa kinerja pemerintah dalam menggali dan mengelolah PAD nya masih rendah. Melihat hal ini pemerintah daerah harus meningkatkan kinerjanya dalam mengelolah PAD dengan cara menggali potensi baru atau dengan mengembangkan potensi yang sudah ada.

3. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	PAD	Transfer Pemerintah Pusat/prov & Pinjaman	Rasio Kemandirian(%)
2007	5.567.377.399	380.900.958.578	1,46
2008	4.209.053.938	320.963.898.017	1,31
2009	6.598.234.717	360.735.771.773	1,54
2010	5.594.269.278	361.529.544.278	1,82
2011	9.407.280.004	404.080.565.693	2,32
Rata-rata			1,69

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DPKPA Minahasa Selatan (Data Olahan)

Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun 2007-2011 masih sangat rendah. Dengan ini dapat dilihat bahwa pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan masih memiliki ketergantungan yang besar atas sumber dana yang berasal dari pihak ekstern. Melihat hal ini, pemerintah daerah harus meningkatkan kinerjanya dalam mengelolah PAD.

4. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Tabel 5. Pertumbuhan Pendapatan

Tahun	PAD	Pertumbuhan %	Total Pendapatan	Pertumbuhan %
2007	5.567.377.399	-	410.775.272.732	-
2008	4.209.053.938	-24,39	355.172.951.955	-13,53
2009	6.598.234.717	56,76	425.904.804.490	19,91
2010	5.594.269.278	-15,21	415.426.217.730	-2,46
2011	9.407.280.004	68,15	515.891.352.257	24,18
Rata-rata		21,32		7,02

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DPKPA Minahasa Selatan (Data Olahan)

Tabel 5 diatas, Pertumbuhan PAD Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2008 terjadi pertumbuhan negatif dengan persentase -24,39%, tahun 2009 terjadi pertumbuhan positif dengan persentase 56,76%, tahun 2010 terjadi pertumbuhan negatif dengan presentase -15,21% dan pada tahun 2011 kembali terjadi pertumbuhan yang positif dengan presentase 68,15%. Untuk pertumbuhan total pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2008 juga terjadi pertumbuhan yang negatif dengan presentase -13,53%, tahun 2009 terjadi pertumbuhan positif dengan persentase 19,91%, tahun 2010 terjadi pertumbuhan negatif dengan presentase -2,46%, dan pada tahun 2011 kembali terjadi pertumbuhan yang positif dengan presentase 24,18%.

Analisis Kinerja Belanja

1. Analisis Varians Belanja

Tabel 6. Varians Belanja

Tahun	Anggaran	Realisasi	Varians	(%)
2007	415.270.985.098	413.751.995.991	1.518.989.107	99,63
2008	374.038.981.228	359.006.195.559	15.032.785.669	95,98
2009	434.448.932.730	385.500.408.490	48.948.524.388	88,73
2010	396.144.228.477	378.957.156.444	17.187.072.033	95,66
2011	508.971.532.527	483.807.278.567	25.164.283.960	95,60
Rata-rata				95,12

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DPKPA Minahasa Selatan (Data Olahan)

Pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan (Mahmudi, 2010:157). Berdasarkan tabel diatas, secara umum kinerja pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009-2011 dikatakan baik karena tidak ada realisasi belanja yang melebihi dari yang dianggarkan. Ini menunjukkan adanya kinerja yang baik dalam pengendalian anggaran yang ketat yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, dan ini merupakan suatu prestasi.

2. Analisis Kecerassian Belanja

Tabel 7. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Tahun	Belanja Operasi	Total Belanja	Rasio (%)
2007	235.069.213.727	413.751.995.991	56,8
2008	250.623.003.610	359.006.195.559	69,8
2009	293.197.491.630	385.500.408.490	76,1
2010	346.977.624.901	378.957.156.444	91,6
2011	399.282.253.916	483.807.278.567	82,5
Rata-rata			75,36

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DPKPA Minahasa Selatan (Data Olahan)

Tabel 8. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja	Rasio (%)
2007	177.402.782.264	413.751.995.991	42,8
2008	108.369.079.034	359.006.195.559	30,1
2009	92.252.916.712	385.500.408.490	23,9
2010	31.979.531.543	378.957.156.444	8,4
2011	84.390.024.651	483.807.278.567	17,5
Rata-rata			24,54

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DPKPA Minahasa Selatan (Data Olahan)

Perhitungan rasio belanja modal dan belanja operasi terhadap total belanja dapat dilihat bahwa sebagian besar dana dialokasikan untuk belanja operasi dengan persentase rasio 56,8%, 69,8%, 76,1%, 91,6% dan 82,5% sedangkan untuk belanja modal hanya sebesar 42,8%, 30,1% 23,9%, 8,4% dan 17,5%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan lebih memprioritaskan untuk pelaksanaan jalannya pemerintahan, sedangkan untuk pembangunan daerahnya masih sangat kecil. Dengan pendapatan daerah yang rendah, seharusnya pemerintah kabupaten Minahasa Selatan lebih memprioritaskan porsi belanjanya pada belanja modal yang akan memberikan manfaat jangka panjang.

3. Rasio Efisiensi Belanja

Tabel 9. Rasio Efisiensi Belanja

Tahun	Anggaran	Realisasi	(%)
2007	415.270.985.098	413.751.995.991	99,63
2008	374.038.981.228	359.006.195.559	95,98
2009	434.448.932.730	385.500.408.490	88,73
2010	396.144.228.477	378.957.156.444	95,66
2011	508.971.532.527	483.807.278.567	95,60
Rata-rata			95,12

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DPKPA Minahasa Selatan (Data Olahan)

Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100% (Mahmudi, 2010:166). Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan telah melakukan efisiensi belanja yang dibuktikan dengan rasio efisiensi pada tahun 2007-2011 berada dibawah 100%, dengan rata-rata 95,12%. Ini menunjukkan adanya kinerja yang baik dalam pengelolaan anggaran belanja pemerintah kabupaten Minahasa Selatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat kesimpulan :

1. Kinerja pendapatan pemerintah kabupaten Minahasa Selatan tahun anggaran 2007-2011 dilihat dari analisis varians secara umum dapat dikatakan cukup baik.
2. Pemerintah kabupaten Minahasa Selatan belum mampu mengola dan mengoptimalkan PADnya. Ini dilihat dari rasio derajat desentralisasi dan rasio kemandirian keuangan yang masih sangat rendah. Kinerja pendapatan pemerintah kabupaten Minahasa Selatan dilihat dari analisis pertumbuhan pendapatan tahun 2008-2011 belum baik, ini ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan yang negatif pada tahun 2008 dan 2010.
3. Kinerja pemerintah kabupaten Minahasa Selatan dalam mengelolah anggaran belanjanya sudah baik, ini dilihat dari realisasi belanja dari tahun 2007-2011 tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan.
4. Kinerja pemerintah kabupaten Minahasa Selatan dalam mengelolah anggaran belanjanya dilihat dari analisis keserasian belanja belum optimal. Ini karena pemerintah lebih memprioritaskan porsi belanjanya untuk belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal. Dengan pendapatan daerah yang rendah seharusnya pemerintah kabupaten Minahasa Selatan lebih memprioritaskan porsi belanjanya pada belanja modal yang akan memberikan manfaat jangka panjang.
5. Kinerja pemerintah kabupaten Minahasa Selatan dalam mengelolah anggaran belanjanya dilihat dari analisis efisiensi belanja sudah baik. ini dilihat dari tidak adanya realisasi belanja yang melebihi dari yang dianggarkan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah kabupaten Minahasa Selatan perlu lebih meningkatkan kinerjanya dalam mengelolah dan mengoptimlkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan menggali potensi baru atau dengan mengembangkan potensi daerah yang ada.
2. Pemerintah kabupaten Minahasa Selatan perlu lebih meningkatkan porsi belanjanya untuk belanja modal yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah rasio-rasio analisis agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang kinerja pemerintah dalam mengelolah anggaran pendapatan dan belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Nurhayati. 2008. Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Kota Bitung. *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Indeks. Jakarta.
- DPKPA. 2013. *Laporan Realisasi Anggaran tahun 2007-2011*. Minahasa Selatan
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Kedua. STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Mahsun, M., Sulistiyowati, F., Purwanugraha, H. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI. Yogyakarta.
- Marizka. 2009. Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Pasalong, Harbani 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah No. 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah No. 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta
- _____. 2004. Undang-undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta

FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS